

Overview I-Account APBN

Pendapatan

Rp3,8 T (244,0%)
▲26,2% (yoy)

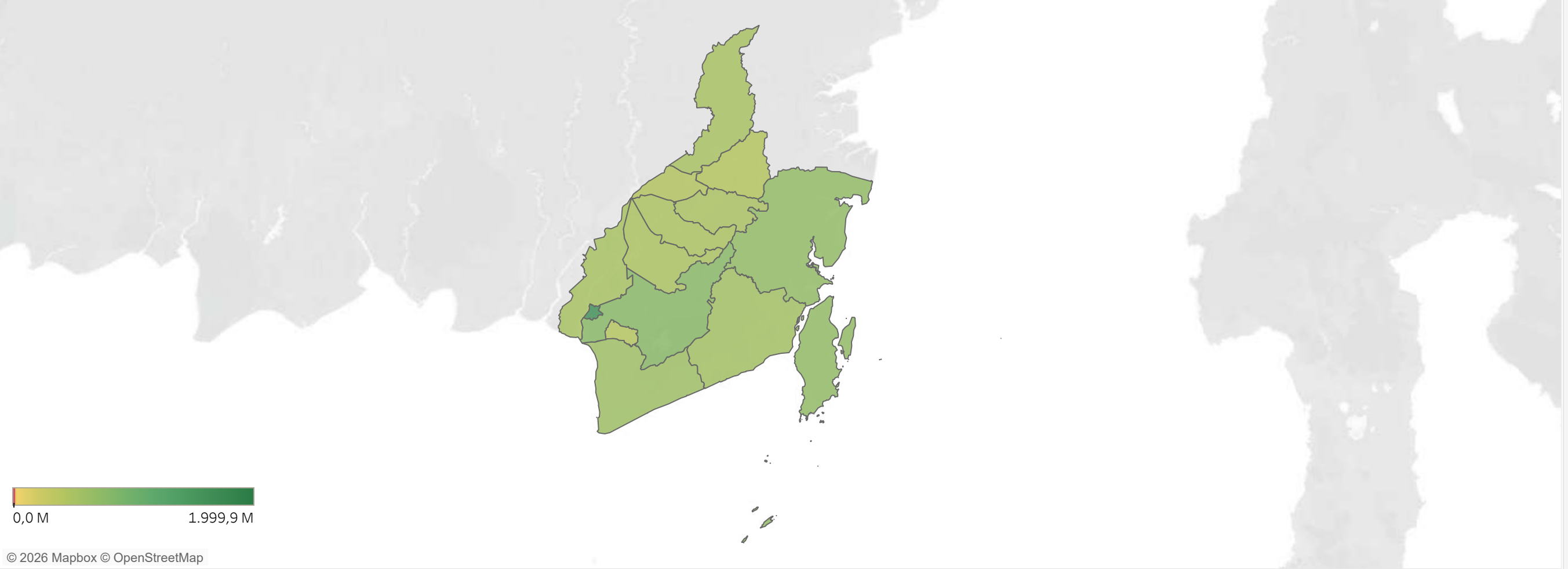
Belanja

Rp9,5 T (31,8%)
▼-6,0% (yoy)

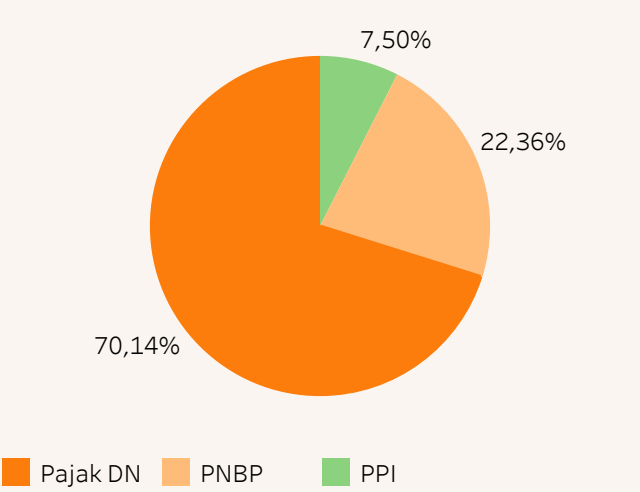
Defisit

Rp-5,7 T (20,1%)
▼19,7% (yoy)

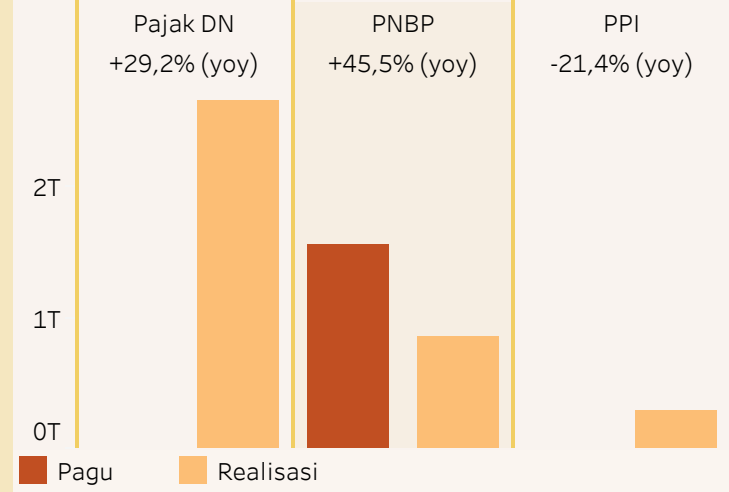
Peta Realisasi Belanja Negara per Wilayah



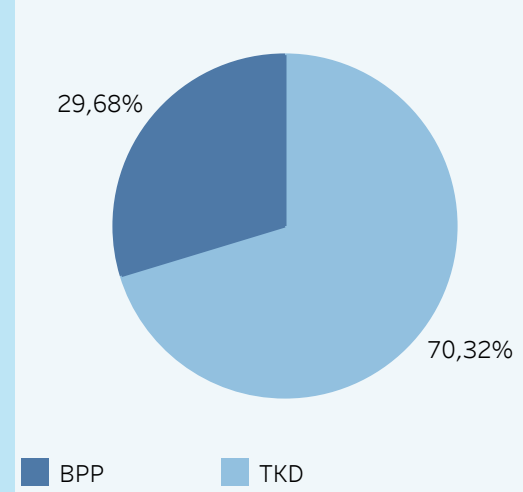
Persentase Komposisi Pendapatan



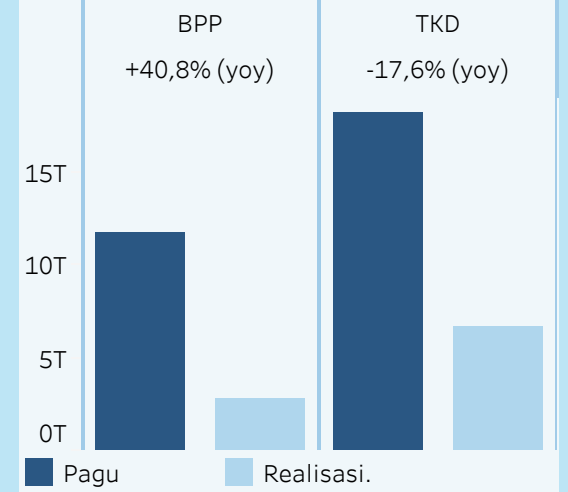
Realisasi per Jenis Pendapatan



Persentase Komposisi Belanja



Realisasi per Jenis Belanja



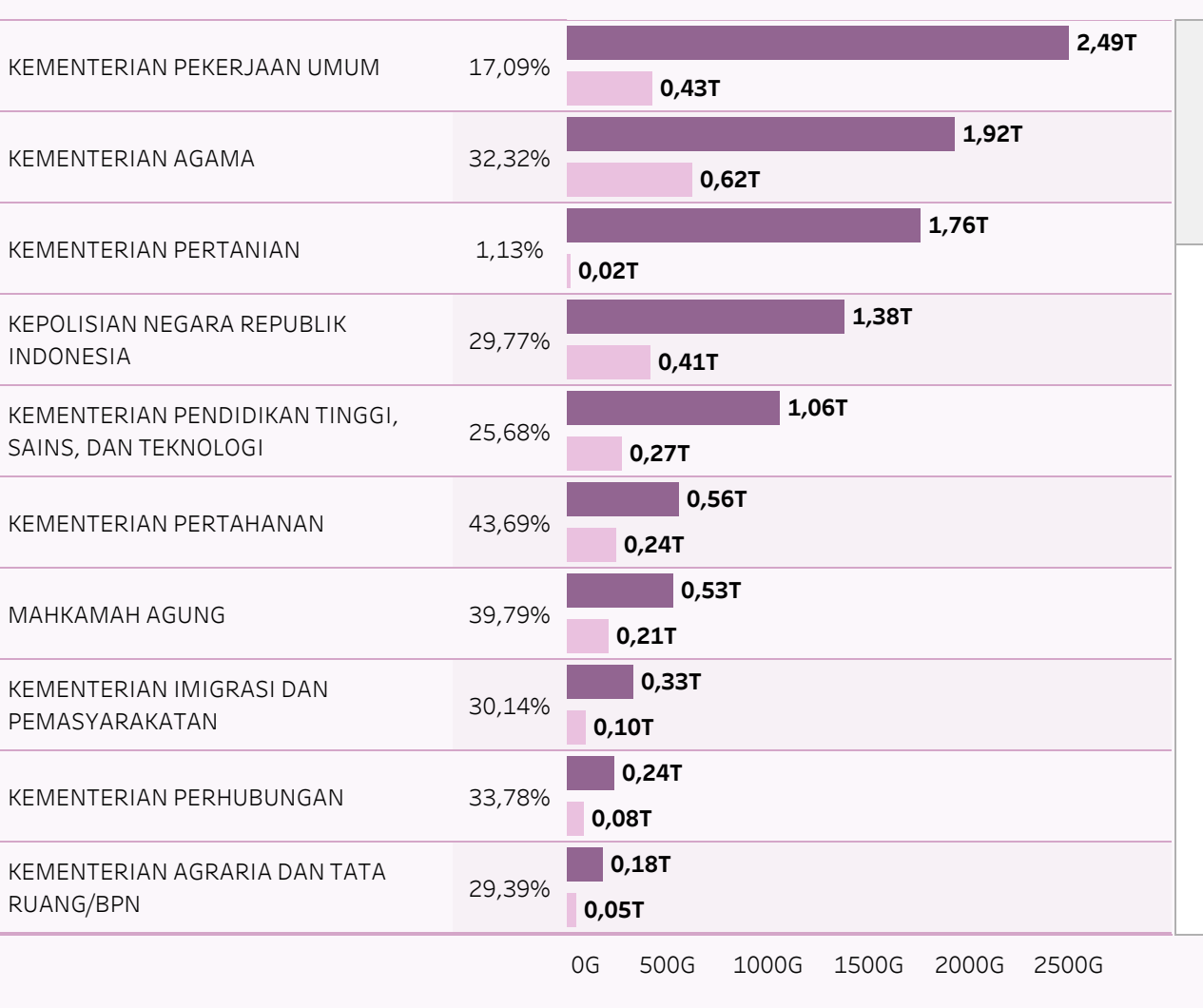
Pendapatan Regional

	Realisasi Y-1	Realisasi	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	3,0T	3,8 T	▲26,23%
Grand Total	3,0T	3,8 T	▲26,23%

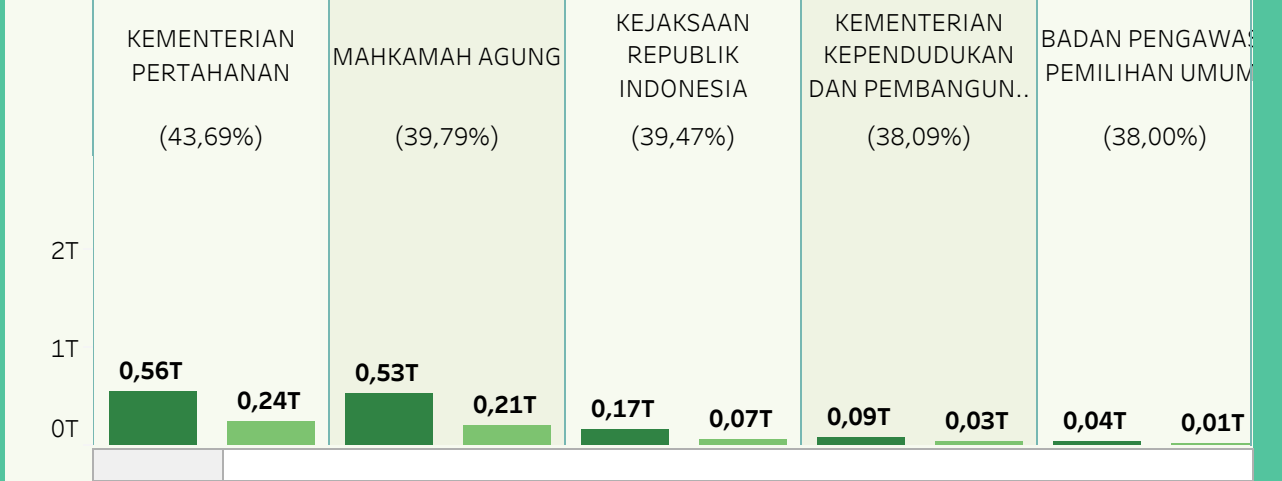
Belanja Regional

	Pagu Y-1	Realisasi Y-1	% thdp Pagu Y-1	Pagu	Realisasi	% thdp Pagu	% Growth
Provinsi Kalimantan Selatan	41,8T	10,1T	24,2%	29,9T	9,5 T	31,8%	▼6,03%
Grand Total	41,8T	10,1T	24,2%	29,9T	9,5 T	31,8%	▼6,03%

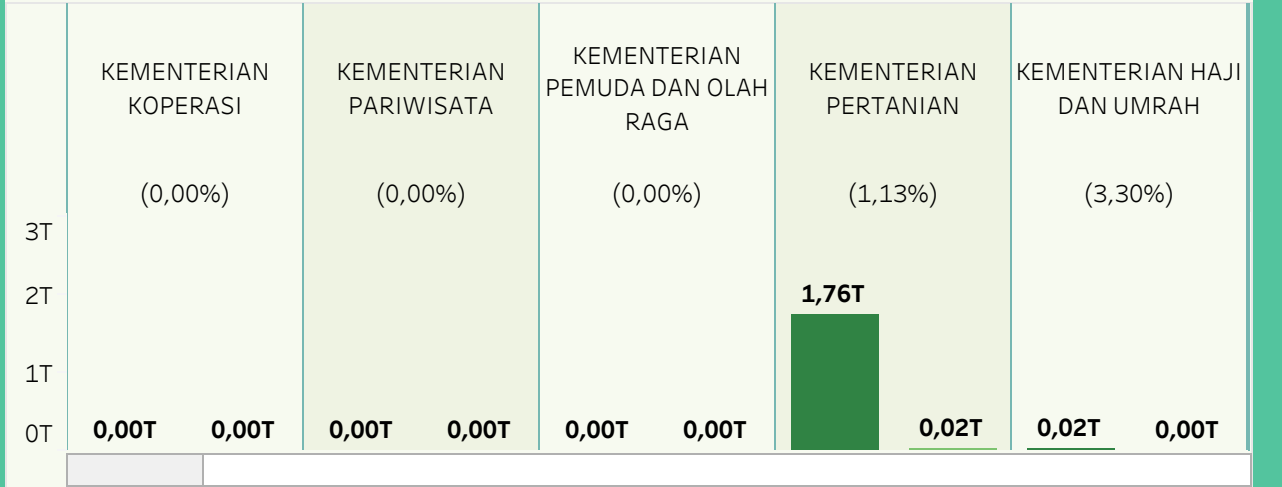
Kinerja 10 KL Pagu Tertinggi



5 KL Persentase Realisasi Tertinggi



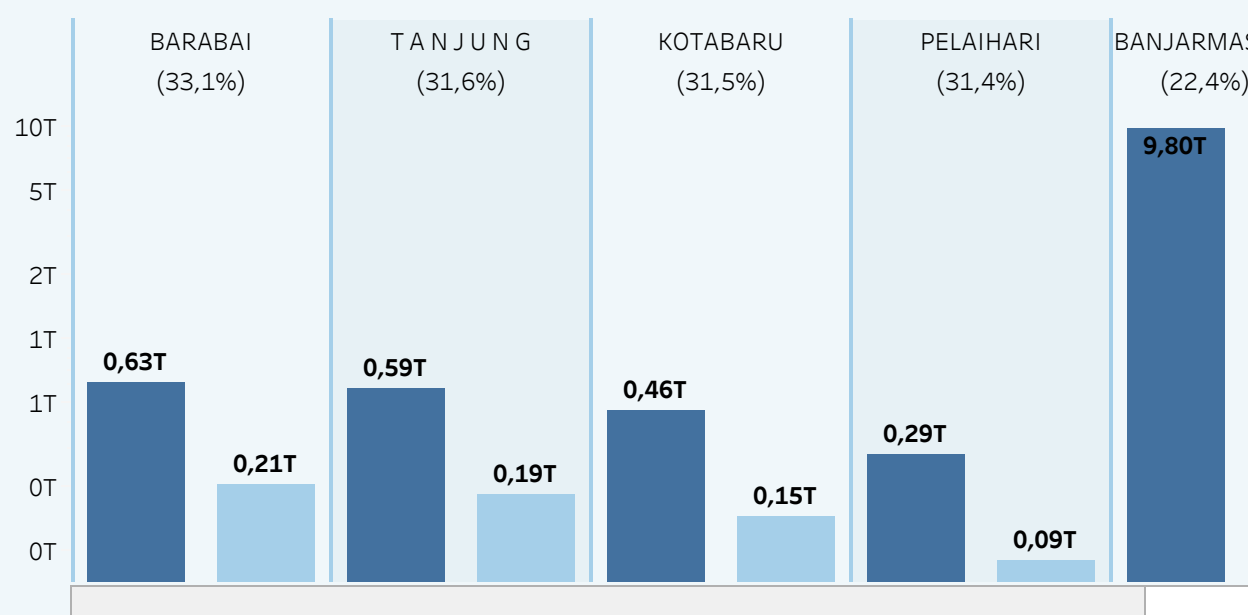
5 KL Persentase Realisasi Terendah



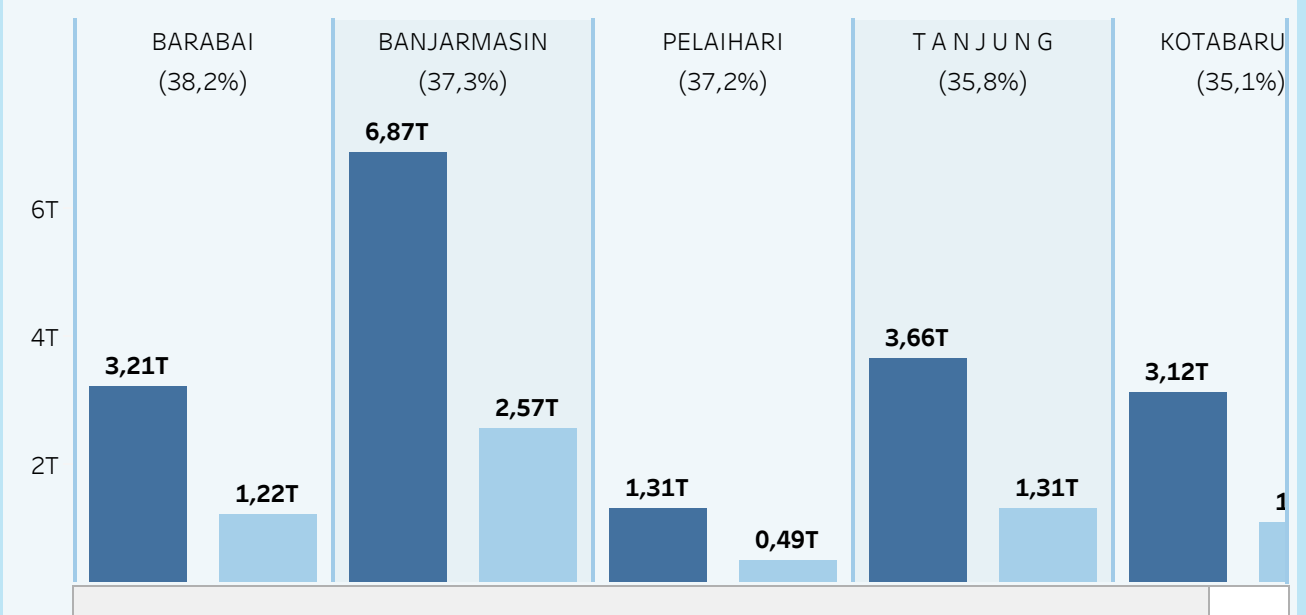
Kinerja Belanja KPPN



Kinerja BPP per KPPN



Kinerja TKD per KPPN



HASIL ANALISIS ISU FISKAL REGIONAL

Analisis Fiskal Regional

A | Perkembangan Pendapatan Negara s.d. 30 April 2026

Kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp3,8 triliun (12,93%) dari target pendapatan negara sebesar Rp29,43 triliun. Realisasi tersebut tumbuh sebesar 26,23% yoy. Realisasi Pajak Dalam Negeri mencapai 15,56% (Rp2,67 triliun), Pajak Perdagangan Internasional mencapai 2,66% (Rp285,50 miliar), serta PNBPN mencapai 54,55% (Rp851,15 miliar). Pendapatan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri (70,14%).

B | Perkembangan Belanja Negara s.d. 30 April 2026

1. **Kinerja Belanja Negara** sebesar Rp9,5 triliun (31,8%) dari pagu Rp30,1 triliun, terkontraksi 6,03% yoy. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai 23,99% (Rp2,82 triliun) dari pagu Rp11,76 triliun, tumbuh 40,77% yoy dan Transfer ke Daerah mencapai 36,78% (Rp6,68 triliun) dari pagu Rp18,17 triliun, terkontraksi 17,59% yoy. Belanja Negara didominasi oleh Transfer ke Daerah (74,26%).

2. **Kinerja Belanja 10 K/L Pagu Tertinggi**, Kementerian PU merupakan K/L dengan pagu tertinggi yaitu Rp2,49 triliun, dengan realisasi mencapai 17,09% (Rp0,43 triliun). Kementerian Pertahanan menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja tertinggi yaitu 43,69% (Rp0,24 triliun) dari pagu Rp0,56 triliun. Sementara, Kementerian Pertanian menjadi K/L yang memiliki kinerja realisasi belanja terendah dengan realisasi baru 1,13% (Rp0,02 triliun) dari pagu Rp1,76 triliun.

3. **Kinerja Belanja 5 K/L Tertinggi dan Terendah**, kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh Kementerian Pertahanan dengan realisasi 43,69% (Rp0,24 triliun) dari pagu Rp0,56 triliun. Sementara, terdapat 3 K/L yang belum merealisasikan anggaran belanja s.d. 30 April 2026 yaitu Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. **Kinerja KPPN**, Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh KPPN Barabai dengan realisasi sebesar 37,3% (Rp1,43 triliun) dari pagu Rp3,83 triliun. Sementara, kinerja penyerapan terendah berada di KPPN Banjarmasin dengan realisasi 28,6% (Rp4,76 triliun) dari pagu Rp16,67 triliun.

Isu dan Rekomendasi Fiskal Regional

A | Isu Pendapatan Negara, meliputi:

Pemerintah menunda penerapan Bea Keluar (Pajak Ekspor) batu bara yang sebelumnya direncanakan mulai awal tahun 2026. Kebijakan ini ditunda karena pemerintah masih harus mematangkan kembali skema dan formula penerapannya. Penundaan ini berpotensi menghilangkan penerimaan negara, termasuk di Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia.

B | Rekomendasi Pendapatan Negara, diperlukan:

Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan perlu berkoordinasi dengan kantor pusat untuk penyesuaian target penerimaannya tahun 2026, karena penundaan penerapan Bea Keluar (Pajak Ekspor) batu bara berdampak pada realisasi penerimaan pada Kanwil Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan.

C | Isu Belanja Negara, meliputi:

Pada Bulan Maret 2026 terdapat Satker baru Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Banjarbaru dengan pagu DIPA Rp1,7 triliun mencakup wilayah kerja se-Kalimantan.

D | Rekomendasi Belanja Negara, diperlukan:

Satker Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Banjarbaru agar segera menyusun rencana kerja dan kegiatan, serta langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran. Kanwil DJPb Kalsel dan KPPN Banjarmasin agar melakukan asistensi dan pengawalan serta koordinasi berkala atas pelaksanaan anggaran pada Satker Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Banjarbaru



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-16



HASIL ANALISIS MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Analisis MBG

Jumlah SPPG tidak ada perubahan yaitu 253, jumlah *supplier* tidak ada perubahan yaitu 833, dan penerima manfaat tidak ada perubahan yaitu 672.750 penerima.

Isu dan Rekomendasi MBG

A | Isu MBG, meliputi:

Untuk memastikan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai ke tangan penerima, distribusi paket beberapa daerah di Kalimantan Selatan cukup menantang karena harus menyeberangi sungai menggunakan ketok.

B | Rekomendasi MBG, diperlukan:

Diperlukan penguatan strategi distribusi yang adaptif dan berbasis kondisi lokal. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu menjalin kemitraan dengan operator transportasi sungai setempat guna menjamin ketersediaan armada yang aman dan terjadwal, serta memberikan dukungan subsidi biaya distribusi agar tidak membebani pelaksana di lapangan. Selain itu, penting untuk membangun titik distribusi antara (*buffer point*) di wilayah strategis yang mudah dijangkau, sehingga dapat meminimalkan risiko keterlambatan dan menjaga kualitas makanan.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-16



HASIL ANALISIS FLPP

Analisis FLPP

Jumlah unit yang dibangun meningkat dari 2.585 menjadi 2.706 unit, realisasi FLPP meningkat dari 2.181 unit menjadi 2.234 unit, jumlah lokasi realisasi FLPP meningkat dari 392 lokasi menjadi 397 lokasi, jumlah Kab/Kota yang ada program FLPP 13 Kab/Kota, dan jumlah nominal FLPP meningkat semula sebesar Rp286.629.836.250,- menjadi Rp293.604.425.250,-.

Isu dan Rekomendasi FLPP

A | Isu FLPP, meliputi:

Kementerian Pertanian dan BPN menetapkan status lahan yang telah dibeli oleh pengembang menjadi status LBS (Lahan Baku Sawah) dengan alasan untuk melindungi lahan sawah yang harus tetap berproduksi. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), lahan tersebut berstatus sebagai area lahan permukiman sehingga pengembang berani membelinya.

B | Rekomendasi FLPP, diperlukan:

Permasalahan tersebut agar dilakukan pembahasan di tingkat kantor pusat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN serta Kementerian Pertanian.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-16



HASIL ANALISIS GIANT SEA WALL

Analisis Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

Isu dan Rekomendasi Giant Sea Wall

Di Kalimantan Selatan tidak terdapat program prioritas *Giant Sea Wall*.

HASIL ANALISIS KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Analisis Koperasi Desa Merah Putih

Progres Fase I

Jumlah desa dan kelurahan yang sudah membentuk Koperasi Merah Putih dan jumlah koperasi desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum adalah sudah maksimal seperti periode sebelumnya yaitu sebanyak 2.013

Progres Fase II

1. Jumlah koperasi yang sudah memiliki akun Simkopdes (*microsite*) sebanyak 2.013.
2. Jumlah koperasi yang sudah memiliki gerai (minimal 1 gerai) sebanyak 1070.
3. Jumlah keseluruhan gerai koperasi yang sudah aktif sebanyak 1.217.
4. Jumlah koperasi melakukan permohonan proposal bisnis sebanyak 299.
5. Jumlah permohonan proposal bisnis sebanyak 860.

Progres Fase III

1. Jumlah koperasi sebanyak 2.013.
2. Total pembangunan bangunan koperasi sebanyak 541.

Isu dan Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih

A | Isu Koperasi Desa Merah Putih, meliputi:

Pemerintah Kota Banjarmasin menguatkan gerakan Koperasi Merah Putih di 52 kelurahan khususnya peningkatan kualitas SDM kepengurusan dan pengawasan. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin membentuk satuan tugas percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan.

B | Rekomendasi Koperasi Desa Merah Putih, diperlukan:

Pemerintah Kota Banjarmasin perlu memastikan pembentukan satuan tugas tidak hanya berfokus pada percepatan kelembagaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan melalui program pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan riil koperasi, termasuk manajemen usaha, tata kelola keuangan, dan pengawasan internal. Selain itu, perlu dikembangkan skema pendampingan intensif (*mentoring*) dengan melibatkan praktisi koperasi, akademisi, dan pelaku usaha agar pengurus

dan pengawas memiliki kapasitas implementatif.

HASIL ANALISIS SEKOLAH RAKYAT

Analisis Sekolah Rakyat

Target jumlah sekolah rakyat sebanyak 3 SR

Realisasi jumlah SR s.d. saat ini yang sudah berjalan per jenjang sebanyak 13 unit :

1. PAUD = 0 Unit
2. SD = 2 Unit
3. SMP = 6
4. SMA = 5

Isu dan Rekomendasi Sekolah Rakyat

A | Isu Sekolah Rakyat, meliputi:

Kementerian Sosial menargetkan tiga Sekolah Rakyat dengan gedung permanen di Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai beroperasi pada Juli 2026, seiring percepatan pembangunan fasilitas pendidikan oleh pemerintah pusat. Seluruh siswa baru tahun ajaran 2026 diharapkan sudah menempati gedung permanen pada awal masa pembelajaran.

B | Rekomendasi Sekolah Rakyat, diperlukan:

Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait perlu berkoordinasi dalam mengawal percepatan pembangunan fisik sekaligus kesiapan nonfisik. Pemerintah perlu memastikan proses konstruksi berjalan sesuai timeline dengan pengawasan ketat dan mitigasi risiko keterlambatan, termasuk percepatan pengadaan sarana prasarana pendukung seperti asrama, sanitasi, dan utilitas dasar. Kesiapan tenaga pendidik, kurikulum berbasis kebutuhan siswa, serta sistem penerimaan dan pembinaan siswa harus dipastikan sejak dini agar transisi ke gedung permanen tidak mengganggu proses belajar.



RCE WEEKLY REPORT
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pemantauan Program Prioritas
Minggu ke-16



HASIL ANALISIS REVITALISASI SEKOLAH

Analisis Revitalisasi Sekolah

Target pelaksanaan Revitalisasi Sekolah TA 2026 sebanyak 29 Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh Satker Kementerian Pekerjaan Umum.

Isu dan Rekomendasi Revitalisasi Sekolah

A | Isu Revitalisasi Sekolah, meliputi:

Terdapat pekerjaan revitalisasi madrasah TA 2025 yang diputus kontraknya karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah pemberian kesempatan.

B | Rekomendasi Revitalisasi Sekolah, diperlukan:

Diperlukan audit dari BPKP untuk dasar pembayaran kepada kontraktor dan dasar penganggaran untuk pekerjaan lanjutannya.

HASIL ANALISIS SMA UNGGUL GARUDA

Analisis SMA Unggul Garuda

Target Jumlah Sekolah Garuda

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Realisasi Jumlah Sekolah Garuda s.d. saat yang sudah berjalan (unit)

1. Sekolah Garuda Transformasi sebanyak 1 (SMAN Banua Kalsel)
2. Sekolah Garuda Baru masih belum ada *update*

Isu dan Rekomendasi SMA Unggul Garuda

A | Isu SMA Unggul Garuda meliputi:

SMA Banua Kalsel sebagai Sekolah Unggul Garuda di Provinsi Kalimantan Selatan pada periode Bulan April 2026 telah melakukan tahapan pembukaan pendaftaran, pengumpulan, dan seleksi berkas pendaftaran calon peserta didik baru secara *online* yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 14 April 2026.

B | Rekomendasi SMA Unggul Garuda, diperlukan:

Pihak sekolah dan perwakilan dari Kemendiknasaintek agar selalu berkoordinasi dan mengawal pelaksanaan tahapan pendaftaran, pengumpulan, dan seleksi berkas calon murid sehingga tahapan berjalan lancar dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

HASIL ANALISIS KETAHANAN PANGAN

Analisis Ketahanan Pangan

Produksi gabah tahun 2026 sampai dengan saat ini mencapai 122.271,30 Ton. Alokasi dana program ketahanan pangan sebesar Rp1,74 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp2,24 miliar (0,13%).

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Pangan

A | Isu Ketahanan Pangan meliputi:

Belum optimalnya ketahanan dan adaptasi sektor pertanian daerah dalam menghadapi risiko perubahan iklim, khususnya ancaman musim kemarau berkepanjangan yang berpotensi menurunkan produktivitas tanaman serta memicu peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman secara tidak merata antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan.

B | Rekomendasi Ketahanan Pangan, diperlukan:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi pertanian berbasis wilayah melalui penyusunan peta rawan kekeringan dan serangan hama sebagai dasar intervensi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembangunan, rehabilitasi, dan distribusi infrastruktur sumber air seperti irigasi tersier, embung, dan pompa air, serta memastikan ketersediaan dan akses petani terhadap varietas tahan kekeringan dan sarana produksi pertanian secara merata.

HASIL ANALISIS KETAHANAN ENERGI

Analisis Ketahanan Energi

Belum ada perubahan/tetap dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah Kab. HST sedang mengusulkan untuk pembangunan Bendungan Pancur Hanau senilai Rp30 miliar. Bendungan ini merupakan infrastruktur vital yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi.

Isu dan Rekomendasi Ketahanan Energi

A | Isu Ketahanan Energi, meliputi:

Pembangunan Bendungan Pancur Hanau di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki potensi sebagai sumber energi terbarukan. Namun, pemanfaatannya belum optimal karena belum ada keterpaduan antara fungsi bendungan dengan pengembangan energi terbarukan di HST, baik dari sisi perencanaan, kelembagaan, maupun kebijakan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat juga masih terbatas.

B | Rekomendasi Ketahanan Energi, diperlukan:

Perlunya sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga masyarakat dalam mengembangkan potensi energi terbarukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).